

ABSTRAK

Studi ini mengkaji peran dari satuan tugas dalam mewaspadai investasi ilegal dalam bentuk perlindungan konsumen, Yang dimana banyak konsumen atau masyarakat mengalami korban penipuan dari investasi ilegal ini. Perlindungan Konsumen diatur didalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menjadi landasan utama dalam mengintegrasikan serta memperkuat penegakan hukum pada sektor perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berpatokan pada penelitian secara deduktif dimulai dari analisa pasal-pasal dalam perundang-undangan. Pengaturan hukum investasi di Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Perlindungan hukum terhadap investor diberikan lewat UU No. 8/1995, antara lain melalui prinsip “*full disclosure*” sebagai upaya preventif dan sanksi yang berat melalui sanksi administratif, pidana dan gugatan perdata, perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Sehingga pemerintah hendaknya lebih tegas dalam pemberian izin usaha dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat serta konsumen sebagai pihak yang dirugikan hendaknya lebih aktif dalam memilih investasi keuangan agar tidak terjebak dari investasi ilegal.

Kata Kunci: Investasi, Perlindungan Konsumen, Satgas

ABSTRAK

This study examines the role of the task force in alerting to illegal investments in the form of consumer protection, where many consumers or the public experience victims of fraud from these illegal investments. Consumer protection is regulated in Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection, which is the main basis for integrating and strengthening law enforcement in the consumer protection sector. This research uses a normative juridical method which is based on deductive research starting from the analysis of articles in legislation. Investment legal regulations in Indonesia are based on Law no. 25 of 2007 concerning capital investment. Legal protection for investors is provided through Law no. 8/1995, among others, through the principle of "full disclosure" as a preventive measure and severe sanctions through administrative sanctions, criminal and civil lawsuits, unlawful acts and defaults. So the government should be more firm in granting business permits in the form of collecting funds from the public and Consumers as the disadvantaged party should be more active in choosing financial investments so as not to be trapped by illegal investments.

Keywords: Investment, Consumer Protection, Task Force